

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sesuatu yang bersifat universal, yang mempunyai makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi dapat disebut sebagai bentuk ataupun mekanisme suatu sistem pemerintahan suatu negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara agar dapat dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Sejak saat Indonesia merdeka sebagai sebuah negara kesatuan republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pembangun Negara Indonesia melalui UUD 1945 menetapkan jika Indonesia menganut asas dan juga sistem pemerintahan demokrasi, yang mana kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Maka dengan begitu Indonesia termasuk dalam negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan yang mana masyarakat Indonesia dapat menyalurkan aspirasi mereka kepada MPR sehingga aspirasi mereka dapat didengar oleh Presiden.

Salah satu pilar demokrasi Indonesia yaitu adanya prinsip Trias Politica yang membagi 3 kekuasaan politik yaitu, *Legislatif*, *Eksekutif* dan *Yudikatif*, yang direalisasikan dalam tiga jenis lembaga negara ada berada pada peringkat yang sejajar satu sama lain. Demokrasi yang menjadi konsep ketatanegaraan dalam fungsinya sebagai ideologi negara memiliki banyak makna dan juga nama, hal tersebut dikarenakan banyaknya implementasi nilai-nilai demokrasi yang sekan-akan menjadi sebuah obsesi dimasyarakat dunia.

Setidaknya, permintaan demokratisasi di beberapa wilayah Islam terkhusus Indonesia dapat didorong oleh dua faktor, yaitu: *Pertama*, secara faktual yang mana di beberapa kawasan, fokusnya yang menganut sistem politik sentralistik ataupun monarki, sistem politizknya cenderung represif dan menjorok korup. Karena bertepatan dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan cenderung lambat sehingga tingkat pengangguran menjadi tinggi. *Kedua*, pada beberapa kawasan Islam telah mencuat kelas-kelas intelektual yang sudah serius dan konsisten untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari adanya pemilihan umum egslatif secara terbuka yang dilakukan dengan hasil suara

terbanyak (voting), dan juga bebasnya masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka, berekspresi, serta kebebasan pers dalam berwacana.¹

Pasca tumbanganya orde baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998, Indonesia mulai memasuki masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Kemajuan demokrasi mulai tahun 1998 sampai pemilu 2004 sudah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masa transisi demokrasi menuju proses demokrasi. Pasca orde baru sering juga disebut dengan era reformasi, yang mana erat hubungan dengan gerakan reformasi imasyarakat Indonesia yang menuntut pemberlakuan demokrasi dan juga HAM.

Munculnya reformasi merupakan sebuah perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya gerakan reformasi adalah sebagai jawaban dari krisis yang menimpa berbagai sudut kehidupan. Krisis ekonomi, politik, hukum, dan juga krisis isosial merupakan hal yang mendorong munculnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan sudah menjadi salah satu faktor yang menentukan lahirnya reformasi ini. Salah satunya adalah perubahan dalam reformasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dikenal dengan otonomi daerah. Reformasi bukan lagi sebuah tuntutan dari elemen masyarakat yang mengharapkan birokrasi, terutama terhadap aparatur agar dapat mempunyai kualitas yang lebih baik lagi. Reformasi tidak hanya terjadi pada pemerintahan secara pusat dan juga daerah saja akan tetapi juga terhadap konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945. Persoalan pokok yang mendorong terjadinya reformasi adalah kesulitan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Harga-harga bahan pokok (sembako) seperti, beras, minyak tanah, minyak goreng, terigu, gula, susu, dan garam juga mengalami kenaikan yang tinggi.

Era Reformasi merupakan hal yang baik bagi wacana kehidupan dalam perpolitikan di Indonesia. Berbagai peristiwa banyak yang terjadi di era reformasi ini merupakan konsekuensi dalam pemenuhan agenda yang saling berganti untuk mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh bangsa pada tahun 1998 saling bahu membahu agar dapat meruntuhkan rezim Orde

¹ A, Ubaedillah. 2014. *Pancasila Demokrasi, Dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal 105

baru agar dapat mewujudkan kehidupan ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya yang lebih baik. Pada saat ke pemimpinan Habibie. Beliau juga memberikan peluang untuk semua pihak agar dapat ikut dalam perpolitikan Indonesia. Memberi peluang kepada semua pihak untuk berkiprah dalam dunia politik. “Semua pihak boleh mendirikan partai politik baru asalkan tetap berasas pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak mempersoalkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan)”².

Dapat dilihat pada masa pemerintahan Soeharto yang terjadi kekacauan seperti kasus krisis ekonomi, pemerintahan puluhan tahun hingga KKN menjadi semakin luas dikalangan pejabat dan keadilan tidak dapat ditegakkan lagi. Hal inilah yang membuat demonstran mengadakan ultimatum agar Soeharto turun dari kursi kepresidenan, berbagai macam demonstrasi yang terjadi semakin membuat pemerintahan kacau seperti yang terjadi tanggal 13 Mei 1998 yaitu terjadinya kerusuhan rasial kepada etnis Tionghoa, khususnya terjadi di Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia. Dan berakhir dengan Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dari kursi Presiden Indonesia secara resmi. Hal ini tidak lepas dari peran Amien Rais yang juga menginginkan lengsernya kepemimpinan Soeharto pada masa itu. Beliau merupakan salah satu tokoh yang mempunyai peran dalam reformasi 98, oleh karena itu beberapa kalangan menganggap Amien Rais sebagai peran utama lahirnya reformasi terutama dalam menarik kekuatan mahasiswa sebagai penggerak yang jatuhnya era soeharto.

Akan tetapi, untuk dapat mewujudkan harapan melalui reformasi bukan hal yang mudah. Walaupun orde baru sudah membangun beberapa prestasi seperti stabilitas moneter dan juga pertumbuhan ekonomi yang baik, citra internasional pada Indonesia yang meningkat menjadi lebih baik dan juga stabilitas politik yang relative seimbang. Akan tetapi. Terdapat banyak masalah yang masih menjadi problem larut dan besar, Yaitu : a) Walaupun adanya pertumbuhan dalam ekonomi. Realita dalam kemiskinan dan juga pengangguran masih menjadi hal fenomena nyata yang susah untuk di bereskan. b) Korupsi telah menyeruak bahkan semakin tinggi kasusnya dari tahun ke tahun.

² Asmawi dan Sutipyo R, PAN: Titian Amien Rais Menuju Istana, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1999, hlm. 106.

Untuk melaksanakan reformasi akhirnya dapat mencapai ditahapan awal yaitu dengan jatuhnya kekuasaan soeharto, sehingga dapat diperkirakan proses reformasi akan berjalan dengan lancar. Disisi lain, ada hasil dari reformasi yang harus dipertahankan agar tidak mengalami sebuah kemunduran. Di antara lainnnya adalah amandemen UUD 1945 yang berjalan melalui 4 tahapan. Dwi fungsi ABRI yang sudah ditata kembali, sehingga seluruh anggota DPRD, DPD. Dan DPR langsung dipilih oleh rakyat³. Hal lainnya juga seperti desentralisasi kekuasaan dan juga kewenangan dari pusat lalu ke provinsi, kota, dan berlanjut ke kabupaten sehingga dapat tercapai keadilan dalam hal sosial dan juga ekonomi yang lebih baik untuk masyarakat⁴.

Amien Rais juga dikenal sebagai tokoh universal yang berpatok bahwa Islam adalah agama yang universal yang berdasar pada tauhid⁵. Islam dalam urusan bernegara juga mempunyai sifat revolusioner yang dapat membuat umat Islam juga dapat mengambil bagian dalam perubahan social. Maka dari itu, Amien Rais dengan senantiasa menautkan pemikirannya dengan dasar pemikiran Al-Qur'an. Dari pemikiran Amien Rais ini dapat mewarnai komunitas Islam yang cukup besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Hal itu dapat dilihat dari posisi Amien rais dan juga peran beliau yang menduduki beberapa jabatan didalam kepengurusan Muhammadiyah tingkat pusat dalam kurun waktu 13 tahun. Muhammadiyah sendiri juga menjadi saksi atas kebijakan politik akomodasi di pemerintahan Orde baru kepada format politik Islam. Keberanian yang dilakukan Amien Rais dipengaruhi juga oleh pengamatan beliau terhadap gerakan-gerakan Islam radikal yang berada di Timur Tengah, khususnya pada gerakan *Ikhwanul Muslimin* di Mesir yang merupakan sebuah obyek peneletian disertasi beliau.

Salah satu masalah yang menyebabkan munculnya penyimpangan sosial dan politik menurut Amien Rais

² Mobarok, M. Mufti. 2003. *For President Amien Rais*. Jakarta: Temprina Media Grafika. Rais, Amien. 1999. *Dari Yogya Ke Bina Graha*. Jakarta: Gema Insani Press. hal 232.

⁴ Mobarok, M. Mufti. 2003. *For President Amien Rais*. Jakarta: Temprina Media Grafika. Rais, Amien. 1999. *Dari Yogya Ke Bina Graha*. Jakarta: Gema Insani Press. hal 232.

⁵ Solihin. 2006. "Pandangan M. Amien Rais Tentang Politik Islam Indonesia (Telaah Atas Hubungan Islam Dan Negara Periode 1985 – 2000)." *Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Djati*.

dikarenakan adanya disfungsi kekuasaan akibat tidak berjalannya regenerasi dan sukses politik. Hal tersebut menyebabkan kekuasaan cenderung korup dan juga banyaknya penyimpangan kekuasaan yang banyak terjadi. Sikap kritis beliau dalam menyelesaikan permasalahan pada kepemimpinan nasional, korupsi, kolusi dan banyaknya penyelewengan kekuasaan politik merupakan sebuah bukti bahwa beliau mendukung adanya sistem pemerintahan yang bersifat demokratis. Sebagai tokoh yang berpengaruh terhadap perubahan pemerintahan Indonesia. Amien Rais dengan tegas menerima demokrasi sebagai preferensi bagi Islam dan sistem politik Indonesia, preferensi tersebut diasumsikan bahwa : *Pertama*, Demokrasi tidak hanya merupakan bentuk vital dan terbaik pemerintah yang sejauh ini diciptakan, akan tetapi juga merupakan sebuah doktrin politik yang dapat memberikan manfaat bagi Negara. *Kedua*, Demokrasi sebagai system politik dan juga pemerintahan yang mempunyai alur sejarah dan juga akar sampai pada zaman Yunani, sehingga bersifat kuat dan bias menjamin terrealisasinya lingkungan politik yang stabil. Dan yang *ketiga*, Demokrasi merupakan sebuah system yang alamiah dan manusiawi, sehingga seluruh rakyat di belahan Negara manapun dapat memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk dapat menentukan pilihannya.⁶

Alasan pemikiran Amien Rais mengenai agenda reformasi yaitu menginginkan perubahan dalam sistem pemerintah Indonesia dalam setiap kebijakannya dengan rakyat sebagai tokoh utamanya sehingga menghasilkan pemerintahan yang lebih bijak dan lebih maju. Sehingga muncullah pemikiran beliau mengenai agenda reformasi di Indonesia dengan dasar pemerintahan orde baru yang kurang dalam melibatkan rakyat disetiap kebijakannya dan kurangnya realita demokrasi pada masa orde baru. Alasan lainnya karena pemerintahan yang sudah puluhan tahun dan oligarki sehingga membuat pemerintahan di Indonesia hanya berporos terhadap elit-elit politik dan juga kelompok tertentu tanpa mengikut sertakan suara rakyat.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian literatur ini menetapkan pada penelitian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan dilakukan dengan cara

⁶ M. Amien Rais. 1986. *Demokrasi Dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES.

membaca, mempelajari, memahami, dan mengkaji lagi literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian yang diambil dari pemikiran Amien rais terhadap agenda reformasi di Indonesia ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah terkait dengan penulisan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Amien Rais dalam agenda reformasi di Indonesia ditinjau dari perspektif fiqh siyasah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pemikiran Amien Rais dalam agenda reformasi di Indonesia perspektif fiqh siyasah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dia atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah terkait dengan penulisan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi literature mengenai pemikiran Amien Rais dalam agenda reformasi yang ditinjau dari perspektif fiqh siayah sehingga menambah wawasan pihak yang ingin mengetahui pemikiran Amien Rais, serta diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan juga memperkaya kajian dalam ruang lingkup Politik secara luas, khususnya dalam ruanglingkup pemikiran politik Islam.

2. Segi Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis sebagai berikut:

- a) Bagi masyarakat, bisa dilihat dan juga untuk pemahaman dalam kontrol kebijakan terhadap pemerintah dengan implementasikan prinsip-prinsip yang disinggung dalam penelitian ini
- b) Bagi pemerintah, agar bisa lebih baik untuk mengimplementasikan secara baik bersumber dari pemikiran Amien Rais yang sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam menjalankan pemerintahan.
- c) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana

yang bermanfaat untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis terhadap pemikiran Amien Rais dalam perspektif fiqh siyasah untuk kebijakan yang lebih baik.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mendapatkan sebuah gambaran dari bagian-bagian yang saling berhubungan, sehingga selanjutnya akan di peroleh penilitian yang lebih sistematis dan juga ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang uraian konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian yang meliputi,

demokrasi, sistem politik dan sistem politik Indonesia, dan suksesi penggulingan kekuasaan yang berfokus pada reformasi, revolusi, dan kudeta.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan d, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang latar belakang dan pembahasan pemikiran Amien Rais dalam agenda reformasi di Indonesia ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.